

# RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

Beranda Infografis Peta



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN  
BANTUL



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.2. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
  - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029;
  - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan

asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

#### **1.4. Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**

##### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**  
**TAHUN 2025**

Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Kendala yang Dihadapi
				(5)	(6)	(7) = (6)/(5)		(8)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8)
1.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>Angka</b>	<b>83</b>	<b>8.005.133.079</b>		<b>1.908.067.100</b>		<b>24%</b>	
1.06.01.2 .01	<b>1. Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>339.524.499</b>	<b>37</b>	<b>127.106.361</b>	<b>46%</b>	<b>37%</b>	
1.06.01.2 .01.0001	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	152.353.999	1	80.632.361	20%	53%	
1.06.01.2 .01.0007	b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	187.170.500	1	46.474.000	20%	25%	
1.06.01.2 .02	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>5.778.270.539</b>	<b>3</b>	<b>1.409.533.060</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	
1.06.01.2 .02.0001	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bul an	37	5.484.966.360	35	1.342.500.908	95%	24%	
1.06.01.2 .02.0002	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	183.314.520	0	28.500.000	0%	16%	Pelaksanaan keg diakhir bulan sehingga sebagian perangkat SPJ masih dalam proses
1.06.01.2 .02.0007	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	4	109.989.659	1	38.532.152	25%	35%	

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
1.06.01.2.05	<b>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>9.160.000</b>	<b>100</b>	<b>9.160.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1.06.01.2.05.0005	a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	9.160.000	2	9.160.000	100%	100%	
1.06.01.2.06	<b>4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>842.857.600</b>	<b>11</b>	<b>96.760.000</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	
1.06.01.2.06.0002	a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	2	316.112.900	0	-	0%	0%	Belanja Modal Electric Generating Set masih dalam proses koordinasi dengan pihak penyedia
1.06.01.2.06.0005	b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	6	38.769.800	2	14.565.000	33%	38%	
1.06.01.2.06.0006	c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	7.800.000	0	1.950.000	0%	25%	
1.06.01.2.06.0009	d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	473.039.900	3	80.245.000	25%	17%	Keg Perjalanan Dinas Biasa belum berjalan secara optimal
1.06.01.2.06.0010	e. Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	4.758.000	0	-	0%	0%	
1.06.01.2.06.0011	f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2.377.000	0	-	0%	0%	
1.06.01.2.08	<b>5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Capaian kinerja penyediaan jasa penunjan urusan pemerintah Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>290.504.121</b>	<b>29</b>	<b>82.328.929</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>	
1.06.01.2.08.0001	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	2	3.510.000	1	1.000.000	50%	28%	
1.06.01.2.08.0002	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	53.813.790	3	13.718.393	25%	25%	
1.06.01.2.08.0003	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	12	51.704.233	3	19.753.580	25%	38%	

1.06.01.2 .08.0004	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	181.476.098	3	47.856.956	25%	26%	
1.06.01.2 .09	<b>6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>744.816.320</b>	<b>3</b>	<b>183.178.750</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
1.06.01.2 .09.0002	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	540.398.000	4	141.045.750	13%	26%	
1.06.01.2 .09.0006	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	117	67.880.000	37	27.780.000	32%	41%	
1.06.01.2 .09.0010	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	136.538.320	1	14.353.000	50%	11%	
1.6.4	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>9.476.154.994</b>	<b>8</b>	<b>758.834.627</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	
1.6.4.201	<b>1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial</b>	<b>Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS</b>	<b>Persen</b>	<b>68</b>	<b>9.328.143.829</b>	<b>8</b>	<b>721.819.082</b>	<b>12%</b>	<b>8%</b>	
1.6.4.201 .1	a. Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1.112	8.105.840.688	1.112	517.910.324	100%	6%	Pelaksanaan keg Boga Sehat bulan Maret baru satu kali dikarenakan keputusan dilaksanakan setelah tanggal 16 Maret 2025
1.6.4.201 .2	b. Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1	Orang	50	24.284.500	25	9.757.500	50%	40%	

		Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota								
1.6.4.201.3	c. Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	89.958.000	0	-	0%	0%	
1.6.4.201.4	d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	8.000.000	3	1.600.000	25%	20%	
1.6.4.201.5	e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	298.466.397	20	38.944.981	17%	13%	
1.6.4.201.6	f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	95	88.078.900	0	-	0%	0%	
1.6.4.201.7	g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	86.069.857	3	25.790.661	25%	30%	
1.6.4.201.8	h. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	108.431.915	9	21.642.795	30%	20%	
1.6.4.201.9	i. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	1.662.500	2	-	8%	0%	
1.6.4.201.10	j. Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	446.424.106	15	86.904.103	25%	19%	
1.6.4.201.11	k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	62.476.966	6	17.118.718	30%	27%	
1.6.4.201.12	l. Pemberian Layanan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	Orang	12	8.450.000	2	2.150.000	17%	25%	

	Rujukan	Kabupaten/Kota								
1.6.4.202	<b>2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>148.011.165</b>	<b>25</b>	<b>37.015.545</b>	<b>31%</b>	<b>25%</b>	
1.6.4.201.5	a. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	148.011.165	0	37.015.545	0%	25%	
1.6.5	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>75</b>	<b>2.985.718.138</b>	<b>2</b>	<b>258.486.574</b>	<b>3%</b>	<b>9%</b>	
1.6.5.202	<b>1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>2.985.718.138</b>	<b>2</b>	<b>258.486.574</b>	<b>2%</b>	<b>9%</b>	
1.6.5.202.1	a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	50.000	534.727.898	5000	58.368.454	10%	11%	Masih ada satu kegiatan pengadaan yang masih dalam proses refocusing yang akan dilaksanakan dibulan berikutnya, dan kegiatan pemeliharaan aplikasi masih dalam proses keadministrasian
1.6.5.202.2	b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	100	323.519.064	0	68.777.072	0%	21%	
1.6.5.202.3	c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1.583	1.756.323.045	0	75.280.285	0%	4%	
1.6.5.202.4	d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	371.148.131	0	56.060.763	0%	15%	
1.6.6	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>564.482.950</b>	<b>13</b>	<b>73.766.940</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	
1.6.6.201	<b>1. Kegiatan Perlindungan</b>	<b>Capaian pemberdayaan</b>	<b>Persen</b>	<b>85</b>	<b>226.863.400</b>	<b>7</b>	<b>14.892.000</b>	<b>8%</b>	<b>7%</b>	



	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN									
4.01.04.5 .06	Perencanaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan									
4.01.04.5 .06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	1	3.554.341.100	0	0	0%	0%	Keg belum berjalan dengan baik masih dalam proses keadministrasian
1.6.2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>963.429.402</b>	<b>13</b>	<b>127.125.527</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>	
1.6.2.202	<b>1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang</b>	<b>Kelompok</b>	<b>45</b>	<b>17.506.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
1.6.2.202 .1	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	1	17.506.000	0	-	0%	0%	
1.6.2.203	<b>2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>945.923.402</b>	<b>13</b>	<b>127.125.527</b>	<b>14%</b>	<b>13%</b>	
1.6.2.203 .1	a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	7.890.000	5	3.165.000	13%	40%	
1.6.2.203 .2	b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	242.893.640	17	61.221.700	100%	25%	
1.6.2.203 .3	c. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	50	71.650.000	5	7.480.000	10%	10%	

	Kabupaten/Kota									
1.6.2.203 .4	d. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	611.569.762	8	51.476.327	13%	8%	
1.6.2.203 .5	e. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	12	11.920.000	0	3.782.500	0%	32%	
1.6.7	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial</b>	<b>Persen</b>	<b>80</b>	<b>252.057.492</b>	<b>25</b>	<b>63.741.648</b>	<b>31%</b>	<b>25%</b>	
1.6.7.201	<b>1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>252.057.492</b>	<b>25</b>	<b>63.741.648</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>	
1.6.7.201 .1	a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	35.016.100	0	-	0%	0%	
1.6.7.201 .2	b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	185.841.392	0	63.241.648	0%	34%	
1.6.7.201 .3	c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	12	31.200.000	1	500.000	8%	2%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 sampai dengan Trwiiwulan I, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor Nomor: B/900.1.12/01070/BPKPAD, tanggal 13 Februari 2025 Tentang Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025; serta Surat Edaran Sekda Kabupaten Bantul Nomor: B/900.1.12.1/01321/BPKPAD, tanggal 26 Februari 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dalam Rangka Efisiensi Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah mempengaruhi realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu melakukan efisiensi anggaran, penundaan pelaksanaan kegiatan, pembatasan pada belanja publikasi, kajian, sosialisasi, belanja cetak, dan perjalanan dinas.
2. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk bulan Maret masih menunggu tindaklanjut dari BPKPAD;
3. Adanya keterbatasan pagu, serta efisiensi di tw 1 menyebabkan beberapa pemenuhan operasional SPM urusan sosial tidak dapat dilaksanakan, termasuk didalamnya peran aktif konsultasi ke kemendagri bangda, permakanan shelter, dan pemenuhan mutu pendataan PPKS;
4. Perlunya dukungan untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten bantul.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2025 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan I dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL KAB. BANTUL

TAHUN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penerimaan Jawa b
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Sosial							25.089.063.905,00	26.786.050.555,00	27.685.162.355,00							28.547.270.550,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.007.234.905,00	21.704.221.555,00	24.138.021.255,00							23.665.441.550,00	
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							20.007.234.905,00	21.704.221.555,00	24.138.021.255,00							23.665.441.550,00	
1	1061	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)				83 angka	83 angka	7.053.787.351,00	7.957.650.579,00	7.925.102.567,00							6.454.492.817,00	

	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			80 persen	80 persen	382.540.277,00	339.524.499,00	339.524.499,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan	meningkatkan kualitas perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah			212.211.246,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	181.361.677,00	152.353.999,00	164.289.787,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana OKASI Umm (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan				146.311.236,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	201.178.600,00	187.170.500,00	157.170.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana OKASI Umm (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan				65.900.010,00	DINAS SOSIAL	

	1	0	0	2.		Administ rasi Keuanga n Perangka t Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	-			12 bulan	12 bulan	5.435.334.715,00	5.778.270.539,00	5.778.270.539,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Perce patan Pertu mbuhan Ekono mi dan Penge ntasa n Kemis kinan	menin gkatny a penga dminis trasi keuang an perang kat daerah			4.816.970.783,00	DINA S SOSI AL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang /bulan	37 Orang /bula n	5.179.488.910,00	5.484.966.360,00	5.495.066.360,00	Kab. Bant ul, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Da na Al ok asi U m u m (D A U)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Perce patan Pertu mbuhan Ekono mi dan Penge ntasa n Kemis kinan			4.512.134.550,00	DINA S SOSI AL	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Doku men	1 Doku men	144.000.000,00	183.314.520,00	183.314.520,00	Kab. Bant ul, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Da na Al ok asi U m u m (D A U)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Perce patan Pertu mbuhan Ekono mi dan Penge ntasa n Kemis kinan			174.151.416,00	DINA S SOSI AL	
	1	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	111.845.805,00	109.989.659,00	109.989.659,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana OKASI Umm (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			130.684.817,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administ rasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-			100 persen	100 persen	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00		Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatkan penguatn administrasi kepegawaian perangkat daerah		2.222.184,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	9.160.000,00	9.160.000,00	9.160.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana OKASI Umm (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			2.222.184,00	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			100 perse n	100 perse n	282.789.800,00	812.857.600,00	812.857.600,00			Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Perce patan Pertu mbuhan Ekono mi dan Penge ntasa n Kemis kinan	menin gkatny a penga dminis trasi umum perang kat daerah			531.794.740,00	DINA S SOSI AL
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.100.000,00	316.112.900,00	316.112.900,00	Kab. Bant ul, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Da na Al ok asi U m m (D A U)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Perce patan Pertu mbuhan Ekono mi dan Penge ntasa n Kemis kinan			119.093.237,00	DINA S SOSI AL	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	38.769.800,00	38.769.800,00	36.639.500,00	Sem ua Kota /Kab , Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Desa	Da na Al ok asi U m m (D A U)	Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertumbuh an ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskinan	Perce patan Pertu mbuhan Ekono mi dan Penge ntasa n Kemis kinan			30.205.171,00	DINA S SOSI AL	
	1	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			5.777.680,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	224.985.000,00	443.039.900,00	407.528.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			370.364.078,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				2 Dokumen	2 Dokumen	4.758.000,00	4.758.000,00	4.758.000,00	Kab. Bantul, Semua	Dana Alokasi untuk	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Percepatan Pertumbuhan			4.132.352,00	DINAS SOSIAL





						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.447.036,00	181.476.098,00	181.476.098,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			117.346.436,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	-		12 bulan	12 bulan	660.860.500,00	727.333.820,00	727.333.820,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	meningkatkan kualitas pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		696.540.017,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																

						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	515.740.500,00	522.915.500,00	540.398.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			368.145.597,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																06
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				117 Unit	117 Unit	67.880.000,00	67.880.000,00	67.880.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			32.103.158,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																10

						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				2 Unit	2 Unit	77.240.000,00	136.538.320,00	134.738.320,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			296.291.262,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS Persentase PSKS dan masyarakat yang mampu menangani PMKS				80 90 Perse n %	80 90 Perse n %	905.879.309,00	963.429.402,00	927.450.502,00							523.959.450,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	-			45 kelom pok	45 kelom pok	17.506.000,00	17.506.000,00	17.506.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan	telaksananya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota		5.615.103,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				1 Dokumen	1 Dokumen	17.506.000,00	17.506.000,00	13.881.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			5.615.103,00	DINAS SOSIAL
	106203				Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	-			95 persen	95 persen	888.373.309,00	945.923.402,00	945.923.402,00				Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan	peningkatan kualitas Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten/Kota		518.344.347,00	DINAS SOSIAL
	106203001				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	26.590.000,00	7.890.000,00	3.165.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			22.420.244,00	DINAS SOSIAL	
	106203002				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

						Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	17 Orang	242.893.640,00	242.893.640,00	239.518.640,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			134.193.762,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	50 Keluarga	71.650.000,00	71.650.000,00	61.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			126.919.693,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Lembaga	60 Lembaga	535.319.669,00	611.569.762,00	597.715.862,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan			228.929.411,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																
						Jumlah Sertifikat				12 Sertifi	12 Sertifi	11.920.000,00	11.920.000,00	11.920.000,00	Kab. Bantul	Dana	-	Percepatan			5.881.237,00	DINAS





	1	0	0	2.	00	Penyediaan Alat Bantu																	
		6	4	01	03		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Orang	53 Orang	79.458.000,00	89.958.000,00	122.488.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum ekonomi, pemerataan (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			5.524.391,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	
		6	4	01	04		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum ekonomi, pemerataan (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			16.711.836,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
		6	4	01	05		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	120 Orang	265.529.800,00	298.466.397,00	286.170.197,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum ekonomi, pemerataan (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			315.570.242,00	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.	00	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat															
		6	4	01	06					95	95	17.428.900,00	88.078.900,00	81.420.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			13.797.167,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak															
		6	4	01	07					12	12	107.330.048,00	86.069.857,00	88.901.289,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			95.784.039,00	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.	00	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
		6	4	01	08		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	94.666.828,00	108.431.915,00	95.081.915,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			84.724.207,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	
		6	4	01	09		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	1.662.500,00	1.662.500,00	1.362.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			100.915.436,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
		6	4	01	10		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	380.045.015,00	446.424.106,00	425.559.426,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			2.190.588.240,00	DINAS SOSIAL

	1	0	0	2.	00	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
		6	4	01	11		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	63.800.612,00	62.476.966,00	62.476.966,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			163.358.414,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pemberian Layanan Rujukan																	
		6	4	01	12		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	17.950.000,00	8.450.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			8.424.697,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	-			80 persen	80 persen	159.714.880,00	148.011.165,00	148.011.165,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		69.061.667,00	DINAS SOSIAL



	1	0	0	2.	00	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
		6	5	02	01		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				50000	50000	251.180.696,00	534.727.898,00	520.304.198,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan (D A U)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			1.198.555.393,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
		6	5	02	02		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				100	100	230.540.928,00	323.519.064,00	313.944.764,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			923.870.026,00	DINAS SOSIAL
	1	0	0	2.	00	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
		6	5	02	03		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/K				1583	3508	1.252.762.100,00	1.261.051.045,00	3.825.948.045,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kemiskinan			2.244.223.652,00	DINAS SOSIAL



















## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2025.

**Kepala Dinas Sosial**  
Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196912311996031017